



ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI BERDASARKAN ISAK 35 PADA KANTOR LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAHARDIKA JAMBI

Arum Hermawati

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: Arumhermawati07@gmail.com

Fathurrahman, S.E., M.S.Ak

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: faturahman@uinjambi.ac.id

Khairiyani, S.E., M.S.Ak

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: khairiyani94@gmail.com

Corresponding author : Arumhermawati07@gmail.com

Abstract: This study aims to apply accounting based on ISAK 35 at the office of the Mahardika Legal Aid Institute. The concept of ISAK 35 allows non-profit oriented entities to adjust the description used by financial statements and the financial statements themselves include statements of financial position, comprehensive income statements, statements of changes in net assets, statements of cash flows, and notes to financial statements. At the Mahardika Legal Aid Institute has not implemented or made reports to these financial statements. The purpose of this study is to find out how the presentation of financial statements at the Legal Aid Institute. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques are carried out using interview and documentation techniques. The data analysis method used is qualitative descriptive, which is a method that describes, describes, compares data and circumstances and explains a situation in such a way that a conclusion can be drawn. The research was conducted at the Mahardika Engineering Legal Aid Institute research.

Based on the results of the analysis, the financial statements of the Mahardika Legal Aid Institute are not in accordance with ISAK 35 because the presentation of the financial statements of the Mahardika Legal Aid Institute still uses simple recording. The financial statements of the Mahardika Legal Aid Institute have not made a statement of financial position, comprehensive income statement, statement of changes in net assets, statement of cash flows, and notes to financial statements.

Keywords : *Implementation Analysis, Applicant, financial statements dan ISAK 35.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan akuntansi berdasarkan ISAK 35 pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi Konsep ISAK 35 yaitu mengizinkan entitas berorientasi nonlaba menyesuaikan deskripsi yang digunakan laporan keuangan dan laporan keuangan itu sendiri mencakup laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan Pada Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi belum menerapkan atau membuat laporan terhadap laporan keuangan tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyajian laporan keuangan pada Lembaga Bantuan Hukum. jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan kualitatif deskriptif, yaitu metode yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data dan keadaan serta menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapatlah ditarik suatu kesimpulan. Adapun penelitian ini dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi Teknik penelitian .

Berdasarkan hasil analisis, laporan keuangan Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi belum sesuai dengan ISAK 35 dikarenakan dalam penyajian laporan keuangan Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi masih menggunakan pencatatan sederhana. Laporan keuangan Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi belum membuat laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Kata kunci : *Analisis Penerapan, laporan keuangan dan ISAK 35.*

LATAR BELAKANG

Dengan melihat kompleksitas ruang lingkup dari organisasi sektor publik dalam berbagai hal, baik dalam hal kegiatan maupun tujuannya, sehingga diperlukan suatu peraturan dalam proses penyusunan pelaporan 2 keuangan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat yang dituangkan dalam suatu kerangka standar akuntansi sektor publik. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. Standar tersebut merupakan hasil perubahan yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2020, dari ketentuan sebelumnya yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba yang berlaku sejak 1997. ISAK merupakan pedoman bagi entitas berorientasi nonlaba dalam menyajikan laporan keuangannya, karena dalam ruang lingkup PSAK 01 tidak menyediakan pedoman bagaimana entitas dengan aktivitas nonlaba menyajikan laporan keuangannya. ISAK 35 memberikan pedoman khusus kepada entitas nonlaba untuk menyajikan laporan keuangan, interpretasi ini diterapkan khusus untuk penyajian laporan keuangan.¹

ISAK No.35 disebutkan bahwa “Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau imbalan ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan”. Bahwa organisasi nirlaba merupakan suatu organisasi yang membantu pemerintah dalam mewujudkan Negara yang sejahtera masyarakatnya karena tidak berorientasi pada keuntungan,

¹Dr. Arie Pratama, CPSAK, CPMA, CertIFR, CertIPSAS, CPA " *Studi Implementasi Akuntansi Keuangan di Berbagai Industri*", 2021 hlm 152.

organisasi ini juga bisa disebut dengan organisasi non profit. Organisasi nirlaba bertujuan melayani publik dan konsumennya lebih terbatas dibandingkan organisasi profit motive yang mempunyai motif untuk mencari laba, yaitu hanya melayani konsumen yang dapat memberikan keuntungan. Apabila terdapat suatu kelompok konsumen yang tidak memberi keuntungan maka entitas bisnis umumnya tidak bersedia melayani.²

Organisasi Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi merupakan Organisasi nirlaba yang pada pokok dan fungsinya yaitu melayani publik dan konsumennya lebih terbatas. Bahwa adapun yang dimaksud Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga masyarakat sipil penyedia bantuan hukum, atau unit kerja bantuan hukum pada organisasi advokat, atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum di perguruan tinggi. Lahimya suatu lembaga bantuan hukum dalam melakukan advokasi hukum maka dapat menumbuhkan, mengembangkan serta meninggikan kesadaran hukum dari masyarakat umumnya dan khususnya kesadaran akan hak-haknya sebagai subjek hukum. Dengan didirikannya lembaga bantuan hukum maka dapat memajukan hukum dan pelaksanaan hukum sesuai dengan perkembangan zaman.

Adapun peranan dan fungsi lembaga bantuan hukum dalam melakukan advokasi hukum yaitu dapat kita ketahui bahwa sebagian besar masyarakat kita tergolong tidak mampu untuk menggunakan dan membayar jasa advokat, maka lembaga bantuan hukum memberikan jasa-jasanya secara cuma-cuma bagi orang yang membutuhkan khususnya bagi orang miskin. Oleh karena itulah dibentuknya Undang-Undang tentang bantuan hukum yaitu Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011. Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum dalam undang - undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin. Sebagaimana sebuah produk hukum yang baru di undangkan, maka memang dibutuhkan waktu untuk mensosialisasikan produk hukum ini. Sebuah produk hukum mesti dilihat dari aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Selain itu mesti juga dilihat watak politis dari kehadiran sebuah produk perundang-undangan.

Tata cara pemberian bantuan hukum cuma-cuma selama ini selalu merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma, yang merupakan penterjemahan teknis dari Undang - Undang Advokat. Jika dalam Undang - Undang Advokat, yang dimaksudkan dengan pemberi bantuan hukum adalah Advokat maka dalam Undang - Undang tentang bantuan hukum ini, pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan. Hal ini bisa dilihat dalam pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : "Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini".³

Adapun laporan Keuangan yang digunakan Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi selama 3 tahun terakhir yaitu sebagai berikut :

Tabel 1

²Salusu, J. 1996. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk OrganisasiPublikan Organisasi non Profit*. Jakarta : PT Grasindo

³Sharen Hm Mangi, "Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Atau Kelompok Orang Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011," *Lex Administratum* 10, No. 1 (2022).

Bagian Daftar Laporan Keuangan LBH Mahardika Jambi.

TAHUN	BUKU KAS BESAR	LABA RUGI	NERACA SALDO	LAPORAN ARUS KAS	INVESTARIS KANTOR
2020	✓	✓	✓		✓
2021	✓	✓	✓		
2022	✓	✓	✓		

O

Organisasi bantuan hukum dalam hal melakukan pekerjaannya itu masih menggunakan pengeluaran pribadi. Selama dana dari kontrak bantuan hukum yang diberikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAMRI belum dicairkan. Dana ini bisa cair, apabila telah memenuhi persyaratan permohonan dan pencairan bantuan hukum litigasi dan non litigasi sebagaimana diatur dalam juklak permohonan bantuan hukum dan pencairan anggaran bantuan hukum. Apabila mau mendapatkan dana kontrak bantuan hukum Organisasi Bantuan Hukum (OBH) tersebut harus lulus verifikasi dan akreditasi. Syarat lulus verifikasi, salah satunya harus membuat laporan keuangan per 3 (tiga) tahun terakhir.⁴

Saat ini Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi ini mengalami sebuah permasalahan yang berkaitan dengan kurangnya pihak manajemen lembaga bantuan hukum mahardika Jambi dalam menilai efektivitas kinerja keuangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Organisasi Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi dalam hal verifikasi dan akreditasi organisasi bantuan hukum telah membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Laporan keuangan tersebut diharapkan dapat mengevaluasi usahanya serta dapat menggunakan informasi dalam laporan keuangan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan perpanjangan verifikasi dan akreditasi organisasi bantuan hukum.

KAJIAN TEORITIS

1. Laporan Keuangan

a. Pengertian laporan keuangan

Laporan keuangan secara umum adalah laporan keuangan merupakan elemen penting bagi sebuah perusahaan atau bisnis. Laporan ini bisa menjadi alat untuk mengetahui bagaimana kinerja hingga [kondisi keuangan perusahaan](#). Laporan keuangan juga menjelaskan apakah sebuah perusahaan berhasil mendapatkan keuntungan atau justru sebaliknya. Perusahaan yang baik harus memiliki laporan keuangan yang jelas dan sehat. Maka dari itu, pembuatan laporan keuangan ini tidak boleh sembarangan, melainkan harus dilakukan orang yang profesional dalam bidang tersebut. Hal ini karena hasil pembuatan laporan harus akurat

⁴Verifikasi Dan Akreditasi, "Laporan Penelitian Verifikasi Dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum 2019," 2019.

lantaran menjadi pendukung dalam pengambilan keputusan pada sebuah perusahaan.⁵

Sedangkan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) laporan keuangan diartikan sebagai bagian dari proses pelaporan keuangan yang terdiri dari jenis laporan keuangan neraca, laporan laba rugi, perubahan posisi keuangan hingga materi penjelasan lain yang menjadi bagian integral dari laporan keuangan. Pembuatan laporan keuangan ini tidak hanya berguna untuk perusahaan saja, namun juga dibutuhkan untuk proses audit yang biasanya dilakukan oleh lembaga pemerintah, firma maupun lembaga lain yang bertujuan untuk mengetahui akurasi pajak, pembiayaan serta investasi. Sebuah laporan bisa dikatakan lengkap jika laporan keuangan terdiri dari beberapa bagian, yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan dan catatan dan laporan lain.⁶

Laporan keuangan menurut PSAK 1 (2015:1), "laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas".

Pengertian laporan keuangan menurut PSAK 1 (2015:2) yaitu:

"laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan".⁷

Salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu andal mengisyaratkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan haruslah disajikan dengan jujur (benar). Akuntansi islam berdasarkan akhlak yang baik oleh 2 karenanya seorang akuntan bertanggungjawab melaporkan semua transaksi dengan benar, jujur, professional serta teliti sesuai dengan syariat islam. Hal ini dijelaskan dalam surat an- Nisa/4 : 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا
الهُوَىٰ إِن تَعَدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

" Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti

⁵Hidayat, Wastam Wahyu (2018). *Fabri, Funky, ed. Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan (PDF)*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia. hlm. 3. ISBN 978-602-5891-76-2.

⁶Ikatan Akuntan Indonesia, "Pernyataan standar akuntansi keuangan," Jakarta: Salemba Empat, 2009.

⁷Marshallino Jordy Wantah, "Analisis Penerapan Psak No. 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada Perum Bulog Divre Sulut Dan Gorontalo," Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi 15, no. 4 (2015).

hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan".⁸

Pada ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt melarang kita untuk mencampur adukkan antara yang batil dan yang benar dan juga Allah Swt. memerintahkan kita untuk selalu bersyukur akan rezki yang telah diberikan-Nya dan memakan makanan yang halal. Dimana yang dimaksudkan dengan makanan yang halal disini adalah halal dari segi bahan dan juga cara memperolehnya. Salah satu perangkat yang dapat menghasilkan informasi laporan keuangan adalah sistem pengendalian internal.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap [perusahaan](#) disamping pihak manajemen perusahaan.

Para pemakai laporan akan menggunakan laporan keuangan untuk meramalkan, membandingkan, dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambil. Informasi mengenai dampak keuangan yang timbul tadi sangat berguna bagi pemakai untuk meramalkan, membandingkan dan menilai keuangan sebuah entitas. Seandainya nilai uang tidak stabil, maka hal ini akan dijelaskan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan akan lebih bermanfaat apabila dilaporkan tidak saja aspek-aspek [kuantitatif](#), tetapi mencakup penjelasan-penjelasan lainnya yang dirasakan perlu dan informasi ini harus [faktual](#) dan dapat diukur secara [objektif](#).⁹

c. Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Pada mulanya laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanyalah sebagai "alat penguji" dari pekerjaan bagian pembukuan, tetapi untuk selanjutnya laporan keuangan tidak hanya sebagai alat penguji tetapi juga sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan tersebut, di mana dengan hasil analisa tersebut pihak-pihak yang berkepentingan mengambil suatu keputusan. Jadi untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan tersebut perlu adanya laporan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Laporan keuangan terdiri atas¹⁰ :

- a. Neraca
- b. Laporan laba rugi
- c. Laporan perubahan modal
- d. Catatan atas laporan keuangan
- e. Laporan arus kas

⁸"Kementrian Agama RI. 'Al - Qur'an dan Terjemahannya'. Jakarta, 2013."

⁹Riswan, Yolanda Fetricia Kusuma (2014). "[Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Dalam Penilaian Kinerja Keuangan PT. Budi Satria Wahana Motor](#)". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 5 (1).

¹⁰Fenty Fauziah, *Pengantar Dasar Akuntansi Buku 1: Teknik dan Konsep Penyusunan Laporan Keuangan* (Muhammadiyah University Press, 2020).

Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan satu persatu yaitu :

2. Tinjauan tentang ISAK 35

a. Konsep ISAK 35

Pada tanggal 11 April 2019 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia telah mengesahkan ISAK 35 (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020.¹¹

Dimana sebelumnya untuk organisasi nonlaba diatur dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 (PSAK 45) revisi 2017 yang sekarang telah menjadi ISAK 35. PSAK 45 dengan ISAK 35 terdapat perbedaan, dimana perbedaan yang mendasar yaitu klasifikasi aset neto, yang mana menggabungkan aset neto terikat permanen dan aset neto terikat temporer menjadi aset neto dengan pembatasan (*with restrictions*) akan mengurangi kompleksitas dan aset neto tidak terikat menjadi aset neto tanpa pembatasan (*without restrictions*), oleh karena itu akan membawa pemahaman yang lebih baik dan manfaat lebih besar bagi pengguna laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba.

ISAK 35 adalah Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba memberikan pedoman penyajian dalam laporan keuangan untuk entitas nonlaba. Dengan adanya pedoman ISAK 35 dapat memberikan informasi keuangan yang jelas kepada donatur dan masyarakat. Berdasarkan ISAK No.35 laporan keuangan yang didapat dari suatu siklus akuntansi entitas nonlaba adalah: laporan Posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan Arus Kas, catatan atas laporan keuangan.

b. Tujuan ISAK 35

Tujuan dibuatnya laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik.

c. Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Menurut ISAK 35

Bahwa dalam membuat laporan keuangan menurut ISAK terdapat beberapa unsur - unsur yang harus dipenuhi, adapun unsur - unsur yang dimaksud sebagai berikut :

Unsur-unsur Keuangan ISAK 35

a. Laporan Posisi Keuangan.

Laporan yang menggambarkan posisi aset, liabilitas dan aset bersih pada waktu tertentu. Berikut penulis akan menguraikan tentang tujuan laporan posisi keuangan, klasifikasi aset dan liabilitas, klasifikasi aset neto tanpa pembatasan dan aset neto dengan pembatasan. Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas dan aset neto serta informasi tentang keterkaitan antara unsur-unsur tersebut. Laporan keuangan entitas mencakup secara keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilitas, dan aset neto.

¹¹Ikatan Akuntansi Indonesia 2018 "ISAK 35 Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba".

Terdapat 2 (format) laporan posisi keuangan yang disajikan sebagai contoh dalam lampiran:

- 1) Format A menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri sebagai bagian dari aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya. Akan tetapi jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka entitas menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya.
- 2) Format B tidak menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri.

Format penulisan laporan keuangan entitas dapat digambarkan sebagai berikut:

a) Aset

Sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaatekonomi dimasa depan diharapkan akan diperolehentitas.

- (1) Kas dan setara kas
- (2) Piutang pasien, pelajar, anggota, dan penerima jasa lain
- (3) Persediaan
- (4) Sewa, asuransi, dan jasa lain yang dibayar dimuka
- (5) Instrumen keuangan dan investasi jangka panjang
- (6) Tanah, gedung, peralatan, serta aset tetap lain yang digunakan untuk menghasilkan barang jasa.

b) Liabilitas

Merupakan klaim dari pihak ketiga atas aset entitas. Liabilitas disusun berdasarkan urutan jatuh tempo dari liabilitas/kewajiban tersebut. Kewajiban yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun digolongkan kewajiban lancar, sedangkan kewajiban yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun digolongkan kepada kewajiban jangka panjang.

Contoh urutan penyajian liabilitas/kewajiban adalah :

- (1) Utang
- (2) Pendapatan Diterima Dimuka
- (3) Utang Lainnya
- (4) Utang Jangka Panjang

c) Aset neto

Aset neto pada umumnya merupakan modal yang didapat dari aset dikurangi liabilitas. Tetapi, dalam laporan posisi keuangan entitas nonlaba aset neto dibagi menjadi dua yaitu:

(1) Aset neto tanpa pembatasan

Merupakan aset yang tidak mempunyai pembatasan penggunaan aset tersebut. Contohnya, dana yang didapat dari donatur tanpa memberikan keterangan apapun, dana tersebut dapat digunakan entitas untuk memenuhi segala kebutuhannya.

(2) Aset nota dengan pembatasan

Merupakan aset yang dibatasi penggunaannya oleh pemberi sumber daya, contohnya pemberian tanah bangunan dengan tujuan tertentu

seperti kas anak yatim dan kaskafir miskin. Lebih sederhananya, donatur memberikan sumber daa dengan syarat – syarat tertentu.

b. Laporan Penghasilan Komprehensif.

Laporan ini digunakan untuk menunjukkan surplus (deficit) dan komprehensif lain suatu entitas. merupakan laporan yang menunjukkan keuntungan atau kerugian entitas selama periode tertentu, didalamnya juga terdapat penghasilan dan beban entitas dalam satu periode. Laporan penghasilan komprehensif atau laba rugi menyajikan informasi mengenai :

- 1) Pendapatan
- 2) Beban
- 3) Laba/rugi neto

Menyajikan Informasi dalam bentuk kolom tunggal

c. Laporan Perubahan Aset Neto.

Merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai aset neto tanpa pembatasan dari sumber dayadan aset neto dengan pembatasan dari pemberisumber daya. Didalamnya juga terdapat informasi mengenai pembebasan aset dari pemberi sumber dayadengan batasan jika ada.

d. Laporan arus kas

Didalamnya memberikan informasi mengenai pemasukan dan pengeluaran suatu entitas dalam satu periode tertentu. Menurut SAK ETAP, didalam laporan arus kas terdapat beberapa informasi mengenai:¹²

- 1) Aktivitas operasi
Aktivitas operasi ini diperoleh dari aktivitas utama penghasilan entitas. Berupa transaksi, kegiatan, dan kondisi lainnya yang dapat mempengaruhi laba dan rugi.
- 2) Aktivitas investasi
Aktivitas investasi ini didapatkan dari pengeluaran kas yang memiliki tujuan untuk mendapatkan penghasilan dimasa yang akan datang.
- 3) Aktivitas pendanaan
Aktivitas yang dapat mempengaruhi perubahan komposisi aset dan liabilitas, contoh aktivitas pendanaan adalah pelunasan pinjaman dan penerimaan kas dari pinjaman, arus kas pendanaan dapat bernilai surplus dan defisit.

¹² “Dewan Standar Akuntansi Keuangan, “SAK ETAP”, (Jakarta:Ikatan Akuntansi Indonesia, 2019).

e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan-laporan di atas. Bertujuan memberikan informasi tambahan tentang perkiraan-perkiraan yang dinyatakan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini berupa perincian dari suatu perkiraan yang disajikan seperti misalnya aset tetap. Catatan atas laporan keuangan memberikan rincian nama aset, liabilitas, aset neto. Misalnya, untuk aset tetap di catatan atas laporan keuangan akan dijelaskan untuk menghitung penyusutan aset tetap, serta kebijakan akuntansi lainnya yang digunakan oleh entitas tersebut.

d. Penyajian Laporan Keuangan Menurut ISAK 35

Akuntansi menghasilkan informasi menyangkut peristiwa atau transaksi yang sudah terjadi yang tentunya bermanfaat untuk membuat keputusan-keputusan menyangkut masa mendatang. Hasil olahan akuntansi itu adalah laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.¹³

Pengertian laporan keuangan adalah Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Dari pengertian laporan keuangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan memberikan gambaran tentang keadaan posisi keuangan (neraca) dan merupakan kesimpulan dari pencatatan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan.¹⁴

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mendeskripsikan keadaan subjek dan objek, baik seseorang, forum, masyarakat, dan lain sebagainya dan berdasarkan atas akibat observasi dan wawancara mendalam yang peneliti lakukan serta argumentasi tentang apa yang ditemukan di lapangan dan dihubungkan dengan konsep operasional dan undang-undang yang memiliki keterkaitan menggunakan problem yang diteliti.

Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian tentang Analisis Penerapan akuntansi berdasarkan ISAK 35 Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi, kegiatan penelitian ini dimulai sejak disahkan penelitian ini. Adapun lokasi penelitian ini di Jalan Bangka No. 02 RT. 21 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi dilakukan pada November 2022 sampai Selesai.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif, ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Data primer

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh oleh peneliti di lapangan dari sumber aslinya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan data primer adalah data yang di peroleh secara langsung melalui observasi lapangan dan melalui hasil wawancara

¹³Irhan Fahmi, Alfabeta 2014. "Analisis Laporan Keuangan" hlm 257-264.

¹⁴Dr. Kasmir, *Analisis laporan keuangan*, 2018.

terhadap pemilik, pembuat laporan dan anggota advokat/paralegal Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi yang menjadi objek penelitian.¹⁵

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan; sedangkan data primer adalah data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau pertama. Jika data sekunder dapat kita peroleh dengan lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia, misalnya di perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi perdagangan, badan pusat statistik, dan kantor pemerintah. Data sekunder ini di peroleh secara tidak langsung dari sumbernya, data yang dimaksud adalah berupa dokumen pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi.¹⁶

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sebuah metode pengumpulan data secara kualitatif, dalam pengumpulan data yang penulis butuhkan untuk penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Observasi

Secara etimologi, observasi berasal dari istilah inggris *observation* yang bermakna pengamatan, pandangan, pengawasan. Atau dalam kata lain keterangan sebagai observe, yang bearti mengamati, melihat, meninjau, menjalankan, mematuhi, dan menghormati. Oleh karena itu observasi menurut kaelan adalah pengamat atau peninjauan secara cermat. Menurutya observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian.¹⁷

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi partisipatif. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.¹⁸

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang Narasumber yaitu Tio Harbani, SH selaku Sekretaris di Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi dan Nurul Ichsan selaku Bendahara di Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi untuk bertukar ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur sebagai instrument pelengkap observasi dalam mengumpulkan data. Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Setelah penulis mengadakan pengamatan, penulis mendatangi sumber informasi yang ada kaitannya dengan objek penelitian serta mengajukan sejumlah pertanyaan secara langsung sehingga apa yang belum terungkap

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 410.

¹⁶Sugiyono, hlm. 410

¹⁷Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 80-81.

¹⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 11.

atau belum lengkap pada saat pengamatan dapat terungkap. Adapun yang menjadi instrument dalam wawancara ini adalah direktur Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi, Advokat/paralegal dan klien Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa penting yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁹ Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informasi dalam bentuk peninggalan budaya, karya seni, karya pikir. Dokumentasi ini diperlukan untuk melengkapi data dari pengguna metode observasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Akuntansi berdasarkan ISAK 35 pada Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi

Laporan keuangan merupakan media bagi manajemen perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor, calon investor, kreditor, calon kreditor dan para pemakai lain dalam membuat keputusan investasi, kredit, dan keputusan lainnya. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan sangat penting sebagai dasar untuk mengalokasikan dana-dana investasi secara efisien dan produktif. Selain itu, perusahaan-perusahaan memberikan laporan keuangan kepada berbagai stakeholder, dengan tujuan untuk memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu agar berguna dalam pengambilan keputusan investasi, monitoring, penghargaan kinerja dan pembuatan kontrakkontrak yang ditujukan kepada pihak perusahaan atau pemangku kepentingan di dalamnya.

Adapun hasil wawancara dengan Bendahara Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi yaitu Bapak Nurul Ichsan, beliau mengatakan :

"Berhubung dengan bagian tugas saya yang mengatur dan mengelolah keuangan dengan cara melakukan transaksi pembelian atau pembayaran terhadap keperluan Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi maka alasan saya dan Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi ini belum menggunakan ISAK 35 dikarenakan tidak mengetahui dan memahami apa itu ISAK 35, baik dalam aplikasi maupun teorinya. Berdasarkan hal tersebut kami hanya menggunakan sistem laporan keuangan yang cukup sederhana seperti: Jurnal umum, Buku kas kecil, Laporan laba rugi dan Neraca saldo. Dalam mengatur serta mengelola keuangan yang mana sudah kami lakukan dari awal Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi berdiri."²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nurul selaku Bendahara Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi dapat di ambil kesimpulan, bahwa proses mengelolah yang dikerjakan oleh pihak bendahara masih belum menerapkan ISAK 35, dikarenakan beberapa alasan yang mana itu mengakibatkan laporan keuangan Lembaga Bantuan

¹⁹Sugiyono, hlm. 72.

²⁰ Nuhur Ichsan, Bendahara Lembaga Batuan Mahardika, wawancara tanggal 14 juli 2023

Hukum Mahardika Jambi masih menggunakan laporan keuangan yang cukup sederhana yaitu : Jurnal umum, Buku kas kecil, Laporan laba rugi dan Neraca saldo. Selain mewawancarai Bendahara, pada kesempatan ini juga Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi yaitu Bapak Tio Harbani, beliau memberi penjelasan berdasarkan hasil wawancara berikut:

" Tugas saya disini adalah menyusun dan membuat proposal serta mengecek setiap data atau pun surat. Pada keseharian saya membuat atau mengecek laporan-laporan seperti pengeluaran secara manual yaitu kas keluar. Jika ditanyakan tentu ketidaktahuan saya akan informasi tentang ISAK 35 selama ini dengan laporan keuangan yang dibuat oleh Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi masih tidak dipermasalahkan oleh pihak manapun." ²¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tio Harbani selaku Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum Mahardika dapat diambil kesimpulan, bahwa pihak pengelolah Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi masih belum tahu akan informasi tentang hal baru yang mana maksudnya adalah tentang pencatatan dan laporan keuangan dalam hal ini adalah ISAK 35. Untuk itu ada baiknya laporan atau sistem pencatatan diperbaharui menjadi lebih modern maksudnya mengikuti perkembangan yang ada, guna meningkatkan kualitas dan kredibilitas Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi itu sendiri dalam mengelola atau mencatat laporan keuangan.

2. Hambatan dalam Penerapan Akuntansi berdasarkan ISAK 35 Pada Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi

Pada tanggal 11 April 2019, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. ISAK 35 mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba. Berdasarkan ISAK 35, laporan keuangan yang dihasilkan dari siklus akuntansi entitas berorientasi nonlaba antara lain: laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, berdasarkan ISAK 35 juga, entitas berorientasi nonlaba memperoleh sumber daya dan pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.

"Pengguna laporan keuangan entitas seperti ini umumnya memiliki kepentingan untuk menilai:

- a) Cara manajemen melakukan tanggung jawab atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka, serta
- b) Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi. Kemampuan entitas berorientasi nonlaba dalam menggunakan sumber daya tersebut dikomunikasikan melalui laporan keuangan". ²²

²¹ Tio Harbani, Sekretaris Lembaga Bantuan Mahardika, wawancara tanggal 14 juli 2023

²² Harnovinsah, et. al., *Isu Kontemporer Akuntansi Publik*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), h. 248

Menyikapi tentang ISAK 35, sebagaimana hasil wawancara dengan pihak terkait yaitu Bendahara Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Bapak Tio Harbani, Sebagai berikut:
"Kenapa belum menggunakan, dikarenakan terdapat beberapa masalah yang ada. Salah satunya dengan minimnya informasi atau pengetahuan yang didapatkan, baik itu dari ketua sampai pengurus yang lain tentang apa dan bagaimana ISAK 35 tersebut, kemudian tidak pernah dipermasalahakan oleh pihak ketiga maka dari itu sistem metode laporan keuangan tidak pernah berubah sampai sekarang."²³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tio Harbani mengenai permasalahan dalam penerapan ISAK 35 dapat disimpulkan, bahwa memang begitu pentingnya informasi dan pengetahuan tentang sebuah konsep baru, agar para pelaku atau pemakai dapat menerapkannya, dengan terlebih dahulu memahami apa dan bagaimana sebuah konsep tersebut. Kemudian juga, selain Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum, juga dimintai keterangan yaitu Bendahara Lembaga Bantuan Hukum Mahardika, hasilnya sebagai berikut:

"Sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Tio Harbani Sekretaris bahwa memang kendalanya adalah minimnya informasi akan ISAK 35, bahkan saya sendiri baru mendengarnya sekarang, jadi sulit bagi kami jika harus menerapkan tanpa aba-aba atau informasi sebelumnya, untuk masalah kegunaannya sudah pasti agar lebih baik lagi buat laporan keuangan, kami memahami itu begitu juga dengan dampak positif yang lainnya, tapi balik lagi seperti apa yang kami katakan diawal, pentingnya informasi dan pemahaman akan apa itu ISAK 35."²⁴

Berdasarkan hasil petikan wawancara tersebut sudah jelas bahwa permasalahan atau kendala utama yang dihadapi adalah minimnya informasi yang masuk kepada pihak pengurus yayasan dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi terhadap Laporan Keuangan ISAK 35.

3. Solusi yang harus dilakukan dalam Penerapan Akuntansi berdasarkan ISAK 35 pada Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi

Seluruh anggota dan pengurus terutama kepada bendahara Lembaga Bantuan Mahardika Jambi harus diberitahu tentang pengetahuan laporan keuangan ISAK 35, bahwa laporan keuangan yang digunakan Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi tidak sesuai dengan standar akuntansi yang mengatur tentang penyajian pelaporan keuangan entitas nonlaba. Agar untuk kedepannya Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi membuat laporan keuangan sesuai dengan keuangan entitas nonlaba ISAK 35. Laporan keuangan akan menjadi terarah dalam penyajiannya, dapat mengetahui jumlah pemasukan aset dan pendapatan lebih besar dari pada pengeluaran begitu juga dengan sebaliknya. dan agar bisa melihat bagaimana laporan posisi keuangan yang sebenarnya.

Solusi untuk penerapan ISAK 35 pada Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi untuk mengetahui terlebih dahulu informasi tentang apa itu ISAK 35 dan penerapan-penerapan apa saja yang ada di dalam ISAK tersebut agar dapat membuat laporan keuangan ISAK 35.

²³ Tio Harbani, Sekretaris Lembaga Bantuan Mahardika, wawancara tanggal 14 juli 2023

²⁴ Nurul Ichsan, Bendahara Lembaga Bantuan Mahardika, wawancara tanggal 14 juli 2023

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Bentuk Laporan Keuangan Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi Yang Belum Menggunakan ISAK 35

Setiap entitas baik itu profit atau non profit sama-sama membuat sebuah laporan keuangan demi kelangsungan hidup entitas tersebut, demi juga mengevaluasi bagaimana kinerja entitas selama setahun kebelakang. Terlebih lagi, bagi pihak entitas nonlaba atau nirlaba yang mana sumber pendanaan salah satunya bersumber penerima bantuan hukum secara cuma-cuma berdasarkan kemampuannya dan dapat dibuktikan bersadarkan surat keterangan domisili dan surat keterangan tidak mampu, yang mana pula membutuhkan pembukuan atau pembuktian atas transaksi atau apa saja yang menjadi catatan di dalam laporan keuangan dengan baik, maksudnya dapat dipertanggung jawabkan dan lebih baik kedepannya. Ini adalah salah satu contoh bentuk laporan pemasukan dan pengeluaran Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi.

15 Nopember 2022	Biaya Gaji Bag. Adm	Rp 1.500.000,0
20 Nopember 2022	Biaya Dokumentasi Acara Pemberdayaan	Rp 100.000,0
21 Nopember 2022	Biaya Konsumsi Acara Pemberdayaan	Rp 500.000,0
21 Nopember 2022	Biaya Spanduk Acara Pemberdayaan	Rp 150.000,0
22 Nopember 2022	Biaya Jasa Profesi Acara Pemberdayaan	Rp 1.000.000,0
23 Nopember 2022	Biaya Pengadaan dan Penjilidan Acara Pemberdayaan	Rp 250.000,0
28 Nopember 2022	Biaya Konsumsi Acara Pemberdayaan	Rp 500.000,0
28 Nopember 2022	Biaya Spanduk Acara Pemberdayaan	Rp 150.000,0
29 Nopember 2022	Biaya Jasa Profesi Acara Pemberdayaan	Rp 1.000.000,0
30 Nopember 2022	Biaya Pengadaan dan Penjilidan Acara Pemberdayaan	Rp 250.000,0
30 Nopember 2022	Biaya Dokumentasi Acara Pemberdayaan	Rp 100.000,0
10 Desember 2022	Biaya Listrik dan Air	Rp 325.142,0
13 Desember 2022	Biaya Jasa Advokat	Rp 15.000.000,0
18 Desember 2022	Biaya Gaji Bag. Adm	Rp 1.500.000,0
18 Desember 2022	Biaya Jasa Advokat	Rp 9.000.000,0
TOTAL		Rp 50.592.935,11

Gambar 8
Contoh Laporan Keuangan

Lembaga Bantuan Mahardika Jambi tahun 2022

2. Laporan Keuangan Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi Berdasarkan ISAK 35 Tahun 2022

A. Laporan Posisi Keuangan

Pada Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi belum menyajikan laporan posisi keuangan sesuai ISAK 35 pada tahun 2022 dan tahun sebelum-sebelumnya dengan tidak menyusun laporan posisi keuangan maka entitas tidak dapat melihat seberapa besar aset lancar dan aset tidak lancar yang dimiliki. Maka dari itu dengan menyusun laporan posisi keuangan dan juga

sesuai dengan ISAK 35, pihak Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi dapat melihat informasi keuangan secara detail.

Berikut laporan posisi keuangan Lembaga Bantuan Hukum Mahardika tahun 2022.

Tabel 4
Laporan Posisi Keuangan
Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi

Lembaga Bantuan Hukum Mahardika	
Laporan Posisi Keuangan	
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022	
ASET	
<i>Aset Lancar</i>	
Kas dan setara kas	Rp. 1.509.357,-
Piutang bunga	-
Investasi jangka pendek	-
Aset lancar lain : Perlengkapan	Rp. 665.500,-
Total Aset Lancar	Rp. 2.174.857,-
<i>Aset Tidak Lancar</i>	
Properti Investasi	-
Investasi Jangka Panjang	-
Aset tetap	-
Total Aset Tidak Lancar	-
TOTAL ASET	Rp. 2.174.857,-
LIABILITAS	
<i>Liabilitas Jangka Pendek</i>	
Pendapatan diterima dimuka	-
Utang jangka pendek	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	-
<i>Liabilitas Jangka Panjang</i>	
Utang jangka panjang	-
Liabilitas imbalan kerja	-
Total Liabilitas Jangka Panjang	-
Total Liabilitas	-
ASET NETO	
<i>Tanpa Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya</i>	Rp. 2.174.857,-
<i>Dengan Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya</i>	-
Total Aset Neto	Rp. 2.174.857,-

TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	Rp. 2.174.857,-
---------------------------------------	------------------------

Pada laporan posisi keuangan Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi tahun 2022 yang sesuai ISAK 35 memberikan sebuah informasi bahwa kas dan setara kas yang dimiliki sebesar Rp. 1.509.357,- sedangkan aset lancar lain berupa perlengkapan sebesar Rp. 665.500,- sehingga total aset yang dimiliki sebesar Rp. 2.174.857, Selama tahun 2022 Lembaga Bantuan Hukum Mahardika memiliki utang sehingga liabilitas yang tercantum pada laporan posisi keuangan kosong.

B. Laporan Penghasilan Komprehensif

Laporan penghasilan komprehensif adalah salah satu laporan keuangan yang mengukur seberapa besar keberhasilan perusahaan dalam periode tertentu. Dilihat pada gambar 9, Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi sudah menyajikan laporan komprehensif atau laporan laba rugi sesuai dengan ISAK 35, mengenai informasi pendapatan dan beban yang telah dilakukan pada Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi.

PENDAPATAN		
PENDAPATAN JASA	Rp	50.666.000
PENDAPATAN BUNGA BANK	-	
TOTAL PENDAPATAN	Rp	50.666.000
BIAYA :		
Biaya Administrasi Bank	Rp	66.000
Biaya Gaji Bag. Adm	Rp	18.000.000
Biaya Listrik dan Air	Rp	3.927.435
Biaya Dokumentasi Acara Pemberdayaan	Rp	200.000
Biaya Jasa Advokat	Rp	24.000.000
Biaya Jasa Profesi Acara Pemberdayaan	Rp	2.000.000
Biaya Konsumsi Acara Pemberdayaan	Rp	1.000.000
Biaya Pengadaan dan Penjilidan Acara Pemberdayaan	Rp	500.000
Biaya Spanduk Acara Pemberdayaan	Rp	300.000
TOTAL BIAYA	Rp	49.993.435
LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	Rp	672.565
PAJAK PENGHASILAN	Rp	-
LABA BERSIH TAHUN 2022	Rp	672.565

Gambar 9
Laporan Penghasilan Komprehensif Tahun 2020

Dapat diketahui bahwa pendapatan yang diterima dalam 1 tahun senilai Rp. 50.666.000,- selama tahun 2022. Sedangkan beban tanpa pembatas senilai Rp. 49.993.435,- selama tahun 2022. Sehingga secara keseluruhan pihak entitas nirlaba atau nonlaba dalam Lembaga Bantuan Hukum mengalami Surplus sebesar Rp. 672.562,-. Sedangkan pendapat dengan pembatasan dari pemberi dana tidak ada. jadi, keseluruhan total penghasilan komprehensif Rp. 672.562,-

Laporan Perubahan Aset Neto

Pada Lembaga Bantuan Mahardika belum menyajikan laporan perubahan aset neto pada tahun 2022 maupun tahun-tahun sebelumnya. pihak Lembaga Bantuan Mahardika Jambi perlu menyusun laporan perubahan aset neto berdasarkan ISAK 35 yang bertujuan untuk mengetahui *surplus (defisit)* aset Lembaga Bantuan Hukum Mahardika dalam tahun berjalan, selain penting juga sangat membantu untuk tahun-tahun berikutnya.

Berikut laporan perubahan aset neto Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi tahun 2022:

Tabel 5
Laporan Perubahan Aset Neto
Lembaga Bantuan Hukum Mahardika 2022

Lembaga Bantuan Hukum Mahardika	
Laporan Perubahan Aset Neto	
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 desember 2022	
ASET NETO TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DANA	
Saldo awal	Rp. 1.502.292,-
<i>Surplus tahun berjalan-</i>	Rp. 672.565,-
Aset neto yang dibebaskan dari pembatas	-
Saldo akhir	Rp. 2.174.857,-
<i>Penghasilan Komprehensif lain</i>	
Saldo awal	-
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-
Saldo akhir	-
Total	-
ASET NETO DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	
Saldo awal	-
Surplus tahun berjalan	-
Aset neto yang dibebaskan dari penghambat	-
Saldo akhir	-
TOTAL ASET	Rp. 2.174.857,-

Pada laporan perubahan aset neto Lembaga Bantuan Hukum Mahardika tahun 2022 yang sesuai ISAK 35, didalamnya memberikan informasi mengenai perubahan aset neto tanpa pembatasan tahun 2020 sebesar Rp. 1.502.292,- dan berubah menjadi Rp. 2.174.857,- dikarenakan panti Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi mengalami surplus sebesar Rp. 672.565,- dan tidak ada penambahan dari aset neto yang dibebaskan sehingga dipastikan keseluruhan aset neto Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi pada tahun 2022 Sebesar Rp. 2.174.857,-.

C. Laporan Arus Kas

Pada Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi dalam penyajiannya tidak menyajikan laporan arus kas pada tahun 2022. Sedangkan salah satu syarat dalam laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba adalah dengan adanya laporan arus kas yaitu sesuai dengan ISAK 35. Tujuan dari laporan ini yaitu untuk mengetahui saldo akhir organisasi atau entitas dan melihat pemasukan serta pengeluaran entitas dalam tahun berjalan.

Berikut laporan arus kas Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi tahun 2022.

Tabel 6

Laporan Arus kas Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi 2022

Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi	
Laporan Arus Kas	
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022	
AKTIVITAS OPERASI	
Kas dari sumbangan	-
Kas dari Pendapatan Jasa	Rp. 50.666.000,-
Penerimaan lain-lain	-
Bunga yang dibayarkan	-
Kas yang dibayarkan pada karyawan	-
<i>Kas neto dan aktivitas operasi</i>	Rp. 50.666.000,-
AKTIVITAS INVESTASI	
Pembelian aset tetap	-
Penerimaan dari penjualan investasi	-
Penerimaan hasil dari investatsi	-
Pembelian investasi	-
<i>Kas neto yang di gunakan untuk aktivitas investasi</i>	-
AKTIVITAS PENDANAAN	

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI BERDASARKAN ISAK 35 PADA KANTOR LEMBAGA
BANTUAN HUKUM MAHARDIKA JAMBI

Penerimaan dari sumbangan yang dibatasi: Investasi dalam dana abadi (Endowment)	-
Investasi bangunan	-
<i>Aktivitas pendanaan lain :</i>	-
Pembayaran utang jangka panjang	-
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan</i>	-
Biaya administrasi	(Rp. 66.000,-)
Biaya gaji administrasi	(Rp. 18.000.000,-)
Biaya listrik dan air	(Rp. 3.927.435,-)
Biaya dokumentasi acara pembedayaan	(Rp. 200.000,-)
Biaya jasa advokat	(Rp. 24.000.000,-)
Biaya jasa profesi acara pembedayaan	(Rp. 2.000.000,-)
Biaya konsumsi acara pembedayaan	(Rp. 1.000.000,-)
Biaya pengadaan dan penjilidan acara	(Rp. 500.000,-)
Biaya spanduk acara	(Rp. 300.000,-)
TOTAL KESELURUHAN	Rp.49.993.435,-
KENAIKAN(PENURUNAN) NETO KAS DAN SETAR KAS	RP. 672.565
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	Rp. 1.502.292,-
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	Rp. 2.174.857,-

Pada laporan arus kas Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi tahun 2022 yang sesuai ISAK 35 memberikan informasi mengenai seluruh dana yang dikelola pihak Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi yaitu Rp. 50.666.000,- dana tersebut digunakan untuk membiayai seluruh aktivitas Lembaga Bantuan Hukum Mahardika jambi mengalami *Surplus* sebesar Rp. 672.565,- , serta dapat kita ketahui saldo kas akhir Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi sebesar Rp. 2.174.857,-.

D. Catatan Laporan Keuangan.

Laporan keuangan Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi tidak sesuai dengan ISAK 35 dikarenakan pihak Lembaga Bantuan Hukum Mahardika sama sekali tidak mengenal catatan atas laporan keuangan sehingga Lembaga Bantuan Hukum Mahardika tidak membuatnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian tentang Analisis Penerapan Akuntansi berdasarkan ISAK 35 Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi yaitu:

- 1.** Dasar pencatatan yang di terapkan di Lembaga Bantuan Hukum Mahardika adalah menggunakan basis Laporan keuangan seperti Buku kas kecil artinya aliran kas masuk dan kas keluar atau pendapatan yang di terima serta penerimaan uang dan biaya pada saat transaksi di Lembaga Bantuan Hukum Mahardika di lakukan pada saat kas benar-benar di keluarkan. Bentuk Laporan Keuangan Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi yang sesuai dengan ISAK 35 adalah Laporan Komprehensif oleh karena Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi mengklasifikasikan ke dalam pendapatan, beban, dan surplus. Adapun laporan yang dimaksud masuk kedalam laporan Laba Rugi yang kami buat yaitu, dibayarkan untuk Admin, dibayarkan untuk gaji/honor karyawan, dibayarkan untuk Listrik dan Air, dokumentasi acara, Jasa Advokat, Jasa Profesi Acara, Konsumsi Acara, Pengadaan dan Penjilidan Acara dan Spanduk Acara Penyuluhan dan Pemberdayaan.
- 2.** Hambatan yang ada dalam penerapan laporan keuangan Lembaga Bantuan Hukum Mahardika kurangnya informasi yang mengenai tentang Laporan Keuangan, kelirunya saat menghitung biaya-biaya pengeluaran dan dalam menyusun laporan keuangan belum memahami sitem standar akuntansi keuangan (SAK).
- 3.** Solusi yang harus dilakukan dalam Penerapan Akuntansi berdasarkan ISAK 35 pada Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi yaitu seluruh anggota dan pengurus organisasi Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi harus diberitahu pengetahuan tentang ISAK 35 agar kedepannya laporan keuangan mandiri yang dipakai pada periode 2018 sampai dengan 2022 kemarin itu salah, bahwa dengan membuat laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 memiliki banyak keuntungan - keuntungan salah satunya mempermudah anggota Lembaga Bantuan Mahardika dalam mengimplementasikan perhitungan dan pencatatan laporan keuangan.

B. Saran

Mengacu pada penelitian yang peneliti lakukan, dan berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, maka penulis mencoba untuk memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi Lembaga Bantuan Hukum Mahardika jambi yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi mencatat transaksi dengan secara lengkap dan berurutan sesuai dengan standar yang berlaku yang di mulai dari jurnal umum, jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas, buku besar dan buku besar pembantu, jurnal penyesuaian dan daftar saldo lalu kemudian laporan keuangan.
2. Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Jambi sebaiknya membuat laporan posisi keuangan, laporan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan hendaknya sesuai dengan komponen keuangan yang dibuat dengan lengkap dan memenuhi komponen laporan keuangan menurut ISAK 35.

DAFTAR REFERENSI

AL-QUR'AN

[1] Kementrian Agama RI. '*Al - Qur'an dan Terjemahannya*'. Jakarta, 2013

BUKU

[2] Akreditasi, Verifikasi Dan. "Laporan Penelitian Verifikasi Dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum 2019," 2019.

[3] Asmita, Firda Nur. "Laporan Perubahan Modal: Pengertian, Komponen Isi dan Contohnya," 8 Februari 2022. <https://koinworks.com/blog/laporan-perubahan-modal/>.

[4] Fauziah, Fenty. Pengantar Dasar Akuntansi Buku 1: Teknik dan Konsep Penyusunan Laporan Keuangan. Muhammadiyah University Press, 2020.

[5] Ikatan Akuntansi Indonesia. Ikatan Akuntansi Indonesia. 2 Ed., 2017.

[6] Indonesia, Ikatan Akuntan. "Pernyataan standar akuntansi keuangan." Jakarta: Salemba Empat, 2009.

[7] "Kementrian Agama RI. '*Al - Qur'an dan Terjemahannya*'. Jakarta, 2013," t.t.

[8] Mangi, Sharen Hm. "Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma–Cuma Kepada Orang Atau Kelompok Orang Miskin Menurut Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2011." *Lex Administratum* 10, No. 1 (2022).

[9] Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak., CA. Akuntansi Sektor Publik "Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum." Yogyakarta: Andi Offset, 2002.

[10] Wantah, Marshallino Jordy. "Analisis Penerapan Psak No. 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada Perum Bulog Divre Sulut Dan Gorontalo." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15, no. 4 (2015).

JURNAL DAN SKRIPSI

[11] Asmita, Firda Nur. “Laporan Perubahan Modal: Pengertian, Komponen Isi dan Contohnya,” 8 Februari 2022.

[12] Akreditasi, Verifikasi Dan. “*Laporan Penelitian Verifikasi Dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum 2019*,” 2019.

[13] Bab II Laporan Arus Kas 2.1. Laporan Arus Kas 2.1.1. *Pengertian Laporan Arus Kas Ikatan Akuntansi Indonesia (2009:Psak No.*” E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, T.T., 12.

[14] Indonesia, Ikatan Akuntan. “*Laporan Arus Kas.*” Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, No. 2 (2009).

[15] Mangi, Sharen HM. “*Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma–Cuma Kepada Orang Atau Kelompok Orang Miskin Menurut Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2011.*” *Lex Administratum* 10, no. 1 (2022).

[16] Mansaleo, Romy P. “*Evaluasi Penerapan Laporan Arus Kas Berdasarkan Psak No. 2 Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI).*” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16, no. 4 (2016).

[17] Primadani, Ratna Marta. “*Sistem Informasi Penyusunan Laporan Arus Kas Dengan Metode Langsung Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Perusahaan Berbasis Multiuser (Studi Kasus di Kantor Notaris-PPAT Dina Ismawati, SH. MM).*” *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 11, no. 2 (2018).

[18] Ramdan, Ajie. “*Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin.*” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2016).

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

[19] Indonesia, Pemerintah Republik. “*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*” Jakarta (Id): Sekretariat Negara, 2010.